ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG LONTAR KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

SKRIPSI

Nama : Fani Edo Saputra
NIM : 222015103

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG LONTAR KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Serjana Akuntansi

Nama : Fani Edo Saputra
NIM : 222015103

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Tanjung Lontar Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat
Nama	: Fani Edo Saputra
Nim	: 222015103
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Study	: Akuntansi
Mata kuliah pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

M. Orbakurniawan, SE.,SH.M.SI
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing II,

Muhammad fahmi, SE.,M.SI
NIDN/NBM: 0029097804/1197277

Mengetahui,
Dekan
u.b. ketua Program Studi Akutansi

Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fani Edo Saputra
NIM	: 222015103
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik
Judul	: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Menigkatkan Pembangunan di Desa Tanjung Lontar Kecamatan Merapi Timu Kabupaten Lahat

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikeudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan in, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
40212AEF713803440
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fani Edo Saputra

ABSTRAK

Fani Edo Saputra /22.2015.103/ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Uapaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Tanjung Lontar Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif. hasil penelitian menunjukan bahwa proses tahapan perencanaan, pengangaran, penatausahaan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keungan desa termasuk kedalam kategori kurang baik, proses pelaksanaan keuangan desa pemerintah desa belum melaksanakan program yang telah di tentukan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat kurang.

Kata kunci:pengelolaan kuangan desa dalam menigkatkan pembangunan.

Abstract

Fani Edo Saputra / 22.2015.103 / An Analysis of Village Financial Management in an Effort to Improve Development in Tanjung Lontar Village, East Merapi District, Lahat Regency

The purpose of this study was to determine management of village fund allocation in an effort to improve village development. The formulation of the problem in this study was how to manage village finance in an effort to improve village development. This type of study was descriptive. Result of this study showed that process of planning, budgeting, administering, accountability, fostering and supervising village financial management belongs to the poor category, the process of implementing village finance in village government had not implemented a program that had been determined and community participation in village development was lacking.

Keywords: Village Financial Management in Improving Development

PENGESAHAN
NO. 511 /Abstract/LB/UMP/ VIII / 20 19
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis pengelolaan kuangan desa dalam upaya meninngkatkan pembangunan di desa tanjung lontar kecamatan merapi timur kabupaten lahat"**, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjaa Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menurut Permendagri N/omor 113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uanga dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun penulisan ini dibagi menjadi lima bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 kesimpuan dan saran. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua serta keluarga yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak M. Orba kurniawan, SE.,SH.M.SI dan Bapak Muhammad fahmi, SE.,M.SI yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan. Viii
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Saekarini Yuliachtri, SE.M.SI selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER ..... **i**

HALAMAN JUDU ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **ix**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xi**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACK ..... **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1
B. Rumusan masalah 9
C. Tujuan penelitian 9
D. Manfaat penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**

A. Landasan Teori 11
1. Pengertian desa 11
a. Fungsi desa 11
b. Tipe-tipe desa 12

2. Pengertian Undang-Undang Desa 12
a. Tujuan Undang-Undang Desa 13
3. Pemerintah Desa 14
a. Susunan organisasi pemerintahan 14
b. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun2005 15
c. penjelasan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 15
4. pengelolahan keuangan desa 17
a. pengelohan keuangan desa Menurut permendagri No 113 tahun 2014 17
5. alokasi dana desa (ADD) 21
a. peraturan bupati lahat tentang dana desa No 3 tahun 2016 pasal 1 22
b. peraturan bupati lahat no 3 tahun 2016 22
6. Alokasi Dana Desa (Add) Dan Tujuan Pengelolaan 23
a. Tujuan alokasi dana desa 23
7. Pembangunan 25
B. Penelitian sebelumnya 26

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis penelitian 30
B. Lokasi penelitian 31
C. Operasional variabel 31
D. Populasi dan sampel 31
E. Data yang digunakan 33
F. Metode pengumpulan data 33
G. Analisi data dan tehnik analisis 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA
A. Hasil Penelitian 36
1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Lontar 36
2. Visi dan Misi Desa Tanjung Lontar 36

3. Struktur organisasi dan pembagian tugas 37
B. Fungsi dan tugas pelaksana pemerintah desa 41
C. Fungsi dan tugas pelaksanaan badan permusyawaratan desa (BPD) 47
D. Fungsi dan tugas pelaksanaan Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa (LPMD) 49
E. Pengelolaan keuangan desa 53
F. Pembahasan 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasan kepada daerah dalam mengelolah rumah tangganya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus diadakan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diberikan kepada daerah, namun secara esensi sebenarnya kemandirian harus di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa.

Desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat di prediksi. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 sangat jelas mengatur Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan Pemerintah Desa sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan ADD juga dapat diandaikan sebagai sebuah kebijakan yang responsif terhadap kepuasan desa yang mendesak. Hal ini karena ADD dapat dipakai untuk mendorong penangan masalah desa tanpa harus lama menunggu program daari pemerintah Kabupaten.oleh karena pentingnya ADD tersebut maka loka karya penentuan program prioritas pemberdayaan dan pembaruan desa. Ditjen PMD (Depdagri) merekomendasikan pembangunan kebijakan ADD diberbagai daerah dengan dukungan oleh adanya penelitian.

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan atau meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik desa. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagain di dalam pengembangan desanya. Alokasi Dana Desa (ADD) juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa dijelaskan bahwa Desa pada tahun 2015 akan mendapatkan bantuan dana dari APBN, dimana bantuaan dana tersebut tidak akan melewati perantara tapi jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, keadaan desa dan angka kematian. Seluruh desa di indonesia sudah menerima kecuran dana transfer dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72.000 desa diseluruh indonesia, akan menerima anggaran terkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber yaitu dana transfer dari APBN dan alokasi dana desa dari kabupaten.

Bagaskara, dkk (2019) Dari hasil penelitian tentang kebijakan ADD sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan dengan anggaran ADD di Desa Sumbesekar didasarkan pada ketentuan penggunaan ADD. ADD diperuntukan untuk pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Elysabeth, dkk (2018) Dari hasil penelitian Pemerintah Desa Besuk menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa Besuk meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan diterapkan dengan acuan pada peraturan Desa. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) berjangka waktu enam (6) tahun, sedangkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) atau Rencana Kerja Tahunan Desa selama satu (1) tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun 2017.

Yohanes dan rohman (2018) dari hasil penelitian Tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan tehadap masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami musibah yang deberikan dalam bentuk Dana Sosial (Dansos), membantu membiaya kegiatan-kegiatan masyarakat desa, berupa pagelaran kesenian. Semuanya sudah di susun dalam APBDesa yang merujuk pada Peraturan Walikota Batu Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga desa bersama masyarakat hanya tinggal menjalankan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Beberapa penelitiaan sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan dana desa seperti penelitiaan yang dilakukan oleh Bakaskara (2019), Arianto (2018), Komang (2018), Gusti (2019), Abu (2015) menyatan bahwa pengelolaan keuangan desa telah

baik. Sedangkan, penelitian yang diteliti oleh Selamet (2015), Nurhayati (2017), Permatasari (2018), Galih (2019), Dina (2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak baik.

Kabupaten Lahat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten Lahat sebenarnya hanya terdiri 7 kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran, jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat bertambah menjadi 22 kecamatan yaitu gumai talang, gumai ulu, jarai, kikim barat, kikim selatan, kikim timur, kikim tengah, kota agung, lahat, lahat selatan, merapi barat, merapi selatan, merapi timur, muara payang, mulak sebingkai, mulak ulu, pagar gunung, pajar bulan, pulau pinang, sukamerindu, tanjung sakti pumu, tanjung sakti pumi, tanjung lebat dan Desa tanjung lotar adalah salah satu desa yang berada di kecamatan merapi timur kabupaten lahat dimana desa tersebut memiliki jumlah penduduk di tahun 2018 sebanyak 969 jiwa, jumlah laki-laki 499 jiwa, jumlah perempuan 471 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 277 KK (kartu keluarga).

Berdasarkan peraturan pemerintah kabupaten lahat yang telah merealisasikan kebijakan pemberian alokasi dana desa (ADD) kepada setiap desa yang ada di kabupaten lahat, pemerintah kabupaten lahat mengeluarkan peraturan bupati lahat nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa (ADD) dengan tujuan pemerataan pembangunan secara mandiri dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber alam secara optimal untuk kepentingan masyaraka.

Adapun rincian anggaran pendapatan yang didapat oleh desa tanjung lontar kecamatan merapi timur kabupaten lahat, dari tahun 2016 sampai 2018 dilihat dari tabel dibawah ini tentang rincian anggaran pendapatan desa tanjung lontar kecamatan merapi timur kabupaten lahat.

Tabel I.1
Rincian Pendapatan Desa Tanjung Lontar

Keterangan	Rincian Perhitungan		
	2016	2017	2018
Dana transfer	1.102.707.000	1.060.079.000	724.426.800
Pendapatan asli desa	1.500.000	1.500.000	500.000
Jumlah	1.104.207.000	1.061.579.000	724.926.800

Sumber: Rincian Pendapatan Desa Tanjung Lontar tahun 2016-2018

Melihat anggaran pendapatan dana desa tahun 2016-2018 realisasi anggaran tersebut digunakan untuk sewa tarup, sewa barang-barang rumah tangga namun tidak direalisasikan untuk program pembinaan lembaga kemasyarakatan desa untuk kepentingan masyarakat.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa tanjung lontar kecamatan merapi timur kabupaten lahat lebih memiliih merealisasikan anggaran alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan fisik, dan semestinya direalisasikan program pembinaan lembaga kemasyarakatan desa supaya dapat mengembangkan potensi ekonomi desa. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam APBDesa dan tidak aktif ikut sertannya masyarakat dalam musyawarahperencanaan pembangunan desa, pelaksanaan, pengawasan dan penanggung jawaban yang seharusnya di musyawarahkan bersama masyarakat desa tanjung lontar.

Tabel I.2
Rincian Pengeluaran Dana Desa Tanjung Lontar

No	Realisasi	Rincian Perhitungan		
		2016	**2017**	**2018**
1	Pendapatan asli desa (PAD)	1.500.000	1.500.000	500.000
2	Dana desa	702.963.000	746.443.000	585.649.186
3	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	21.785.000	13.076.000	11.229.000
4	Alokasi dana desa	377.959.000	300.560.000	127.552.800
	Jumlah	1.104.207.000	1.061.579.000	724.926.800

Sumber: Rincian Pendapatan Desa Tanjung Lontar tahun 2016-2018

Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa tanjung lontar kecamatan merapi tmur kabupaten lahat, dilakukan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertangung jawaban msih kurang baik, dimana terkait dengan kurangnya sosialisasi dalam setiap perencanaan desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyrakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehinga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap pengelolahan alokasi dana desa, kondisi teersebut juga berdampak pula belum efektifnya pencapaiyan tujuan pengeloaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan didesa tanjung lontar kecamatan merapi timur kabupaten lahat.

Berdasarkan dari hasil penelitian, pada tahap perencanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkanpembangunan di desa tanjung lontar msih kurang baik. Hal ini terlihat pada pembahasan tahap perencanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan data yang besar dari pemerintahan daerah melalui APBDesa sehingga kurangnya partisipasi dari masyarakat desa.

Hasil penelitiaan ini, dilihat dari tanggungjawaban pemerintah Desa Tanjung Lontar terhadap masyarakat belum ada, sebab tidak terlihatnya transparasi atau keterbukaan perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah sebagai pengelola keuangan desa yang transparasi kepada masyrakat.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas tentunya akan muncul berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat di mengoptimalkan anggaran alokasi dana desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan alokasi dana desa (ADD) ini dapat mengerakan roda perekonomiaan desa, demi tercapainya kesejatraan dan pembangunan didesa tanjung lontar agar berjalan efektif dan efisien, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka judul penelitian ini yaitu: **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Tanjung Lotar Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat".**

B. Rumusan masalah

Bedarasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan keuangan desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Tanjung Lotar Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Tanjung Lotar Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Sebagai bukti empiris yang ada tentang analisis Pengelolaan keuangan desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Tanjung Lotar Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

2. Bagi Pemerintah Desa.

   Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan mengenai tentang analisis Pengelolaan keuangan desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Tanjung Lotar Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai analisis penegelolaan keuangan desa dan efektivitas alokasi dana desa didesa gedung agung, desa tanjung lontar, desa sengkuang kec. Merapi timur kab. Lahat

DAFTAR PUSTAKA

Abu Rahum (2015) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. 3(4): 1623-1636

Bagaskara Dwi Gaung Shub'hi, Afifudin, dan Roni P. Widodo (2019) Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Desa. *Respon Publik.*13(1): 12-17

Dina Fitri Septarini, Elisabeth Lia Riani Kore (2016) Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. 7(1): 40-61

Dies Nurhayati (2017) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen*. 1(2): 1-12

Elysabeth Permatasari, Sopanah, dan Khajanah Hasan (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Conference on innovation and application of science and technology*. 186-194

Gusti Ayu Desy Juliantari, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati (2019) Pemanfaatan Awig-Awig Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar, Di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jurusan Akuntansi Program S1*. 10(1): 1-11

Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas, Anwar (2019) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi. *Forum Ekonomi*. 21(1): 12-22

Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga: Jakarta

Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggiriawan, I Nyoman Sutapa (2018) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. 3(1): 306-321

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta

Permendagri no 113 tahun 2014

Peraturan bupati lahat nomor 3 tahun 2016

Selamet Joko Utomo (2015) Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. *Media Trend.* 10(1): 19-31

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta: Bandung

Sujarweni, V Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Putaka Baru Press: Yogyakarta

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016

Yohanes Victoria Arianto dan Abd. Rohman. (2018). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 7(2): 71-76